BAB 1

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi di mana warganya mendapatkan hak dan kebebasan yang sama. Kesetaraan hak dan kebebasan asasi warganya dilindungi dengan Undang-Undang. Dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis perlu dilakukan penegakan terhadap hak asasi manusia yang diterapkan dengan adil.¹ Ciri dari negara yang demokratis adalah salah satunya dengan dilaksanakannya pemilihan umum. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara.²

Pemilihan umum di Indonesia dilakukan untuk memilih pemimpin negara, pemimpin daerah dan dewan perwakilan rakyat. Indonesia menggunakan prinsip dari demokrasi Pancasila yakni dengan melindungi hak asasi manusia serta pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.³ Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu. Dari sudut pandang Hukum Tata Negara (HTN), pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat yang harus diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia dan adil serta tidak memihak (wajib).

Bagi negara demokrasi modern, pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan

¹ Ellya Rosana, 2016, "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Volume 12, Nomor 1, hal 38.

² M. Gaffar Janedi, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 36.

³ *Ibid.*, hal. xiv.

pembentukan pemerintahan.⁴ Karena dianggap sebagai tolak ukur dan lambang dari sistem demokrasi tersebut. Lalu pemilihan umum di Indonesia merupakan wadah di mana rakyat dapat membangun pemerintahan yang demokratis. Dari sisi konstitusional, dasar utamanya adalah pengakuan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.⁵

Dalam hal pemilihan umum, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak politik warga negaranya agar berpartisipasi dalam memberikan suara ketika pemilihan umum dan mencalonkan diri untuk jabatan tertentu. Kesetaraan hak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kesetaraan hak yang dimaksud penulis adalah perlakuan yang sama dalam pemerintahan. Pasal-Pasal yang memuat tentang kesetaraan di pemerintahan yakni Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa:

Menerima kesempatan yang sama dalam pemerintahan adalah hak setiap warga negara.

Kemudian, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

Seluruh warga negara harus diperlakukan sama oleh pemerintah dan hukum tanpa terkecuali.

Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BPP), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

⁴ *Ibid.*, hal. 36.

⁵ *Ibid.*, hal. 38.

Lalu, Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah:

Pemilih merupakan warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Permasalahan hak politik mantan koruptor muncul setelah ditetapkannya PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023, dimana Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 muatannya menambah syarat perhitungan pidana tambahan pencabutan hak politik pada proses pencalonan anggota legislatif mantan terpidana korupsi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tersebut mengabaikan masa jeda waktu lima (5) tahun bagi mantan terpidana korupsi yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif jika dalam vonis mereka memuat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

Baik PKPU Nomor 10 Tahun 2023 maupun PKPU Nomor 11 Tahun 2023 sama-sama mendapat beragam pendapat yang kontra dari masyarakat. Kontroversi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 maupun PKPU Nomor 11 Tahun 2023 melahirkan masing-masing argumentasi, bagi yang kontra akan memberikan argumentasi bahwa aturan ini merupakan kemunduran luar biasa dalam hal penjaminan nilai integritas pemilu sebab kedua PKPU ini telah menentang dua putusan MK Nomor 87 tahun 2022 dan Nomor 12 tahun 2023. Kemudian, kedua PKPU tersebut merupakan tindakan penyeludupan hukum yang pro koruptor karena dua PKPU tersebut mempermudah mantan terpidana korupsi mencalonkan diri kembali.

Salah satu bentuk indikasi penyelundupan pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yaitu terdapat Pasal yang bisa membuka celah bagi mantan koruptor mendaftar sebagai calon legislatif tanpa perlu melewati jeda masa lima tahun

sebagaimana yang diatur Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini tentu membuat KPU dapat dikatakan membangkang terhadap putusan MK, dan secara tidak langsung juga memperlihatkan sikap KPU yang memperbolehkan praktik korupsi dikarenakan peraturan tersebut memberikan angin segar kepada para mantan terpidana korupsi dalam mengikuti pemilihan umum 2024.

KPU beralasan bahwasanya mantan narapidana korupsi boleh untuk mencalonkan dirinya lagi dengan membuat surat keterangan pernah di penjara sebagai syarat administratif pencalonan maka sah-sah saja untuk bagi dia mencalonkan diri. Pasal 240 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga permasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana.

KPU juga menyatakan alasan lainnya berdasarkan hak asasi manusia yang di atur dalam konstitusi Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa:

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Selanjutnya, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi:

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya jika mantan terpidana tersebut dalam vonisnya terdapat hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, maka mantan terpidana tersebut tidak perlu menunggu jeda waktu lima tahun setelah mantan terpidana tersebut

menyelesaikan hukumannya maka ia diperbolehkan untuk langsung mencalonkan diri tanpa menunggu jeda waktu yang telah ditetapkan. Padahal dalam Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023 sudah tegas menyebut kewajiban melewati masa jeda waktu lima tahun, tanpa syarat tambahan apapun.⁶

ICW meyakini ada rentetan kekeliruan logika pikir dari KPU menyangkut hal tersebut. Pertama, PKPU, baik untuk calon anggota DPR, DPRD, maupun DPD bertentangan dengan Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023. Bagaimana tidak, dua putusan MK itu sama sekali tidak memberikan pengecualian syarat berupa adanya pencabutan hak politik jika mantan terpidana korupsi ingin maju sebagai calon anggota legislatif.⁷ Lalu, ICW, PERLUDEM, Saut Situmorang, dan Abraham Samad mengajukan *judicial review* PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 ke Mahkamah Agung (MA). Kemudian, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon melalui Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2023. Putusan tersebut menyatakan:

Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

⁶ Sulis Setiowati dan Achmad Umardani, 2024, “Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip *Musawa* dan Keadilan”, *Journal of Constitutional Law*, Volume 4, Nomor 1, hal 2.

⁷ Indonesia Corruption Watch, “[Menyoal Penyelundupan Pasal oleh KPU tentang Syarat Pencalonan Mantan Napi Korupsi sebagai Anggota DPR, DPRD, dan DPD RI](https://antikorupsi.org/id/menyoal-penyelundupan-pasal-oleh-kpu-tentang-syarat-pencalonan-mantan-napi-korupsi-sebagai-anggota)”, <https://antikorupsi.org/id/menyoal-penyelundupan-pasal-oleh-kpu-tentang-syarat-pencalonan-mantan-napi-korupsi-sebagai-anggota>, dikunjungi pada tanggal 29 Juni 2025 Jam 19.36.

Negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengategorikan tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*), sebab korupsi merupakan salah satu pelanggaran yang paling berbahaya dibandingkan dengan penyalahgunaan narkoba maupun pelanggaran lainnya. Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia bisa dikatakan sudah dalam taraf yang memprihatinkan, karena semua sektor seperti eksekutif, legislatif, serta yudikatif sudah merasakan terlibat dalam proses tindak pidana korupsi.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang termasuk ke dalam unsur-unsur Tipikor adalah, (1) setiap orang, termasuk korporasi, yang (2) melakukan perbuatan melawan hukum, (3) memperkaya diri sendiri, dan (4) merugikan keuangan negara.⁹ Oleh karenanya tindak pidana korupsi membutuhkan upaya pemberantasan yang ekstra pula, karena korupsi banyak sekali melanggar hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat, apalagi perbuatan tersebut diperparah karena telah menjadi hal yang umum dan terstruktur secara sistematis di Indonesia. Bisa kita lihat banyaknya pemberian hukuman tidak sesuai atau tergolong ringan yang dijatuhi hakim di pengadilan kepada para pelaku koruptor atas perbuatan yang telah merugikan negara tersebut.

Kasus-kasus Tipikor biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda dengan kasus-kasus tindak pidana umum (misal pencurian dan penipuan), seperti permintaan uang saku yang berlebihan dan peningkatan frekuensi perjalanan

⁸ Mochamad Ilham Maulana dan Ismunarno, 2023, "Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dengan Cara Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 11, Nomor 2, hal. 9.

⁹ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.17.

dinas.¹⁰ Kegagalan elit politik Indonesia dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi jelas akan merugikan dan membahayakan negara, yang mana nantinya masyarakat luas juga yang secara tidak langsung akan menerima dampak buruk dari kerugian negara tersebut.

Seperti yang kita ketahui korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seperti tidak ada habisnya. Baik dari segi jumlah maupun kualitas dari tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dan struktur, menyangkup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal ini penting untuk KPU ketahui bahwa praktik korupsi politik kian masif dan gencar terjadi belakangan waktu terakhir. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, dari total 1.519 tersangka, satu per tiga atau 521 orang diantaranya berasal dari klaster politik.¹¹

Menurut penulis, di sini KPU memiliki peranan penting untuk mengurangi, mencegah serta menyaring peserta pemilu yang terindikasi sebagai mantan terpidana korupsi. Karena untuk kedepannya dikhawatirkan akan mengulang kembali tindak pidana korupsi yang pernah dilakukan dengan nominal jauh lebih besar lagi dari sebelumnya. Jika tetap dibiarkan maka dampak negatif yang diakibatkan korupsi tentu akan merugikan negara dan juga masyarakat secara luas.

Oleh karena itu penulis akan mengembangkan persoalan ini dalam karya ilmiah. Terlepas dari persoalan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang secara tidak langsung memberikan peluang bagi mantan narapidana korupsi mencalonkan diri

¹⁰ *Ibid.*, hal.15.

¹¹ Indonesia Corruption Watch, 2023, "[Menyoal Penyelundupan Pasal oleh KPU tentang Syarat Pencalonan Mantan Napi Korupsi sebagai Anggota DPR, DPRD, dan DPD RI](https://antikorupsi.org/id/menyoal-penyelundupan-pasal-oleh-kpu-tentang-syarat-pencalonan-mantan-napi-korupsi-sebagai-anggota)", <https://antikorupsi.org/id/menyoal-penyelundupan-pasal-oleh-kpu-tentang-syarat-pencalonan-mantan-napi-korupsi-sebagai-anggota>, dikunjungi pada tanggal 29 Juni 2025 Jam 21.46.

serta menduduki kembali kursi legislatif. Hal ini tentu juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, karena dinilai peraturan ini membuka pintu bagi calon legislatif yang tidak bersih untuk kembali duduk pada kursi kekuasaan pemerintahan. Umumnya Tipikor dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik.¹² Sehingga menjadi sebuah polemik berkepanjangan yang akan membuat negara Indonesia ini tidak akan berkesudahan dengan masalah korupsi.

Hal tersebut tentu saja merupakan suatu permasalahan. Seharusnya, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana berat karena merugikan banyak pihak di negara ini sehingga sebaiknya tidak dapat dijadikan sebagai calon legislatif. Namun faktanya, dengan adanya PKPU tersebut para calon tindak pidana diberikan peluang untuk menjadi calon legislatif. Padahal, hasil yang lahir dari proses yang penuh pelanggaran tentu telah mencedera kedaulatan rakyat dan asas pemilu yang jujur dan adil.¹³ Sehingga dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji pokok permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul:

“IMPLIKASI TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA ”

B. Perumusan Masalah

¹² Aziz Syamsuddin, *Loc. cit.*

¹³ M. Gaffar Janedi, *Op. cit.*, hal. 43.

Dalam penelitian hukum, rumusan masalah bertujuan untuk merumuskan isu hukum secara spesifik yang akan dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Permasalahan hukum yang diangkat harus mengandung ketidakjelasan norma (*norm conflict*), kekosongan hukum (*rechtvacuum*), atau ketidaksesuaian antara norma dan praktik (*norm discrepancy*), sehingga layak untuk dikaji secara yuridis.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif, serta dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status hukum mantan narapidana korupsi yang ikut serta pada Pemilihan Umum 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 terhadap mantan terpidana korupsi yang lolos dan menjabat pada lembaga Legislatif?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mengidentifikasi sumber hukum yang dapat diterapkan pada problem hukum tertentu dan menemukan solusi atas problem yang diidentifikasi tersebut.¹⁴ Penelitian hukum dapat juga dilakukan untuk tujuan memperluas pengetahuan mengenai bidang hukum tertentu.¹⁵

Penelitian hukum oleh praktisi hukum dilakukan untuk kepentingan praktis dalam rangka memberikan nasihat hukum, pendapat dan pengetahuan khusus

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 31.

¹⁵ *Ibid.*

yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur-prosedur yang relevan dengan apa yang ditanyakan oleh klien.¹⁶

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status hukum mantan narapidana korupsi pada Pemilihan Umum 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 terhadap para mantan terpidana korupsi yang kembali menjabat dilembaga legislatif.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya dalam hukum ketatanegaraan serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama hukum tata negara secara khusus tentang bagaimana status hukum mantan narapidana yang maju maupun telah lolos sebagai anggota lembaga legislatif.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis serta masyarakat luas pada umumnya perihal hukum positif mengenai aturan-

¹⁶ *Ibid.*, hal. 34.

aturan dalam pemerintahan negara indonesia terutama dalam hal yang berkaitan dengan pemilihan.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis sendiri tentang peraturan-peraturan pemilihan di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum secara luas untuk lebih mengetahui mengenai aturan pemilu baik sebagai pemilih dan yang dipilih.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada para praktisi hukum ketika terlibat dalam persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul pada persoalan administrasi apabila ada pencalonan yang dirasa tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.¹⁷ Menurut Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.¹⁸

Sedangkan menurut Sunaryati Hartono di Indonesia, rupanya istilah penelitian hukum hanya dikaitkan dengan penelitian di lapangan. Jadi, dengan

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 1.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Peneliti Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hal. 35.

penelitian sosiologis, tidak dianggap *research* atau penelitian.¹⁹ Lebih jauh, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.²⁰

Selain itu karna hukum selalu berubah mengikuti perkembangan di masyarakat. Maka salah satu cara terbaik yang dapat dilakukan adalah melakukan penelitian hukum secara menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut, guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum yang akan diteliti.²¹

Dapat diambil kesimpulan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin-doktrin. Secara sederhana, penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang

¹⁹ Soenaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hal. 132.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.*, hal. 20.

²¹ *Ibid.*, hlm. 13.

timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Dalam hal ini berkaitan dengan posisi mantan terpidana korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif.

Pada penelitian hukum normatif, disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, karena fokus utamanya adalah pada asas-asas hukum, norma hukum, serta kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan ini menggunakan metode *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) objek kajiannya ialah PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.²² Pengeolaan dan Penganalisaan data menggunakan penelitian kualitatif, berdasarkan penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional.

Sebagai salah satu kasus korupsi Irman Gusman, mantan Ketua DPD RI. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 4,5 tahun dan cabutan hak politik. Namun, pada Pemilu 2024, Irman Gusman kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPD dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU), meskipun memiliki status sebagai mantan narapidana korupsi. Dalam proses pencalonannya, Irman Gusman secara terbuka mengumumkan status hukumnya melalui media cetak di Sumatera Barat, yang sesuai dengan pedoman keterbukaan status mantan narapidana korupsi sebagaimana diatur oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pemilu dan pilkada sebelumnya.²³

²² *Ibid.*, hal. 24.

²³ Rina Atriana, 2017, "Divonis 4,5 Tahun Penjara, Hak Politik Irman Gusman Juga Dicabut", <https://news.detik.com/berita/d-3426880/divonis-4-5-tahun-penjara-hak-politik-irman-gusman-juga-dicabut>. dikunjungi pada tanggal 6 Agustus 2025 Jam 12.36.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, serta objek penelitian hukum yang pelaksanaannya terdapat di dalam masyarakat. Dalam konteks ilmu hukum, penelitian deskriptif analitis biasanya digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum, dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis bagaimana suatu norma hukum diterapkan atau diinterpretasikan dalam praktik.

3. Pendekatan Penelitian

Kajian penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif/penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif.²⁴

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut meliputi:²⁵

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistem hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

²⁴Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Nomor 1, hal 4.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.*, hal. 14.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang berorientasi pada hukum sebagai sistem norma, di mana norma-norma hukum itu merupakan acuan dalam menilai suatu peristiwa hukum. Penelitian ini berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder tanpa melibatkan data lapangan secara langsung.²⁶

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian hukum yang dipergunakan yaitu sumber penelitian berupa data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, sekunder dan data tertier. Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Merupakan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan dengan objek penelitian, hasil penelitian bisa dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terbagi atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini bahan yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²⁷
- 3) Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

²⁶ *Ibid.*, hal. 13.

²⁷ *Ibid.*

contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah metode studi kepustakaan, yaitu melalui teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk penelitian ini

6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Bahan Data

Berdasarkan sifat dari metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan yang menjadi objek kajian permasalahan dalam penulisan penelitian ini perihal PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

²⁸ *Ibid.*